Analisis Kualitas Kinerja Pegawai Pengelola Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

John Toding¹, Petrus Ma'na², Sita Sabandar³

Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.13, Daya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Abstrak: Judul Penelitian ini adalah analisis kualitas kinerja pegawai barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Mamberamo tengah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas kinerja pegawai pengelola barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023. Adapun Penelitian ini di laksanakan berdasarkan metode Deskriptif Kualitatif Teknik analisis Data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan 3 (tiga) Tahapan yakni Tahap Rdeduksi Data yang telah dikumpulkan kedua tahap display Data dengan menghubungkan dengan teori dan tahap penyajian kesimpulan dengan melakukan presentase dari jawaban informan di pegawai Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo tengah. Adapun hasil penelitian Kualitas pada indikator kualitas kerja di atas dapat dilihat bahwa mayoritas atau 55,71% responden sering memiliki kinerja yang berkualitas, kemudian 32,85% responden selalu memiliki kinerja yang berkualitas, 11,42% responden jarang memiliki kinerja yang berkualitas dan tidak ada responden yang tidak pernah memiliki kinerja yang berkualitas. Hasil rekapitulasi tersebut, menggambarkan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memiliki kinerja yang baik dan dijalankan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah. Kuantitas Kerja di atas dapat dilihat bahwa mayoritas atau 44,28% responden sering memiliki kinerja yang berkuantitas, kemudian 41,42% responden selalu memiliki kinerja yang berkuantitas, 14,28% responden jarang memiliki kinerja yang berkuantitas dan tidak ada responden yang tidak pernah memiliki kinerja yang berkuantitas. Hasil rekapitulasi tersebut, menggambarkan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memiliki kuantitas kinerja yang baik. Pemanfaatan Waktu pada indikator pemanfaatan waktu di atas dapat dilihat bahwa mayoritas atau 47,15% responden sering memanfaatkan waktu kerja dengan baik, kemudian 22,85% responden selalumemanfaatkan waktu kerja dengan baik, 30,0% responden jarang memanfaatkan waktu kerja dengan baik, dan tidak ada responden yang tidak pernah memanfaatkan waktu kerja dengan baik. Hasil rekapitulasi tersebut, menggambarkan bahwa secara umum pemanfaatan waktu para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah cukup baik. kerjasama pada indikator kerjasama di atas dapat dilihat bahwa mayoritas atau 62,85% responden sering memiliki kerjasama yang baik dalam melaksanakan kerjanya, kemudian 20,0% responden selalu memiliki kerjasama yang baik dalam melaksanakan kerjanya, 17,14% responden jarang memiliki kerjasama yang baik dalam melaksanakan kerjanya, dan tidak ada responden yang tidak pernah memiliki kerjasama yang baik dalam melaksanakan kerjanya. Hasil rekapitulasi tersebut, menggambarkan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Mamberamo Tengah . Kesimpulan semua ukuran kualitas kinerja pada kantor sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan pegawai dengan baik namun demikian ada kegiatan pengadaan Barang yang belum sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan di

***TITLE REPRESENTS CONTENTS TEXT, BRIEF, WRITTEN NOT SPECIFIC,
AND NOT MORE THAN FOURTEEN WORDS***

Abstract:

Keywords:

PENDAHULUAN

Dikabupaten Mamberamo Tengah Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah relatif berbeda dengan swasta. Perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pembiayaannya. Seluruh pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/ APBD, baik sebagian ataupun keseluruhan, harus mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan pengadaan barang atau jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku atau dengan kata lain memperoleh barang dengan memenuhi kriteria 6 T, yaitu: tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, tepat prosedur, tepat jenis, dan tepat jumlah. Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah terdapat prinsip-prinsip yang tidak tercakup dalam pengadaan barang/ jasa di sektor swasta yang biasanya hanya menekankan pada sisi efisiensi dan efektifitas. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak diskriminatif, dan Akuntabel.

Di Kabupaten Mamberamo Tengah kegiatan Pengadaan barang/ jasa secara konvensional memiliki beberapa kelemahan (LKPP, 2019), yaitu pengadaan barang secara arisan dan adanya kickback selama proses pengadaan, melakukan suap untuk memenangkan pengadaan, proses pengadaan yang tidak transparan, pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, pemasok memasang harga yang lebih tinggi (mark-up), memenangkan perusahaan kerabat, saudara atau kelompok tertentu, tidak membuka akses bagi

peserta dari daerah sekitarnya. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/ jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi. Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam proses pengadaan barang/ jasa secara konvensional, pemerintah telah mengeluarkan sebuah inovasi dalam pengadaan barang/ jasa disektor publik, yaitu e-procurement. Pentingnya e-procurement secara eksplisit dinyatakan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government (Reddick, 2004). Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional. Oleh karena itu, pada Tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota wajib melakukan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (e-procurement). E-procurement adalah sistem pengadaan barang/ jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

TEORI DAN KONSEP

2.1 Konsep Kinerja

Hasibuan (2017) kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja Pegawai

adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari Pegawai serta organisasi bersangkutan menurut Mangkuprawira (2011). Kinerja menurut Simamora (2015) bahwa untuk mencapai agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja Pegawai yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal.

Bernadin dalam Rosita & Tri (2016) dan Rikantika (2014) menjelaskan bahwa kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan, yaitu:

1. Kualitas. Tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.
2. Kuantitas. Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu. Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas. Tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya manusia dalam proses manajemen. Kemandirian. Tingkat di mana seseorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.
5. Komitmen. Tingkat di mana pegawai memiliki komitmen kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi.

2.2 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

E-procurement dalam E- Government Perkembangan teknologi komunikasi yang ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlangsung satu arah - antara pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Disinilah terjadi perubahan atau transformasi

dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi. Penerapan e-government (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik) yang kemudian dikenal dengan sebutan digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang dimulai secara digital tentunya sampai implementasi interaksi secara langsung nantinya.

Kebijakan negara. E-procurement atau Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Pengadaan barang/jasa berbasis internet atau e- procurement merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan nilai tata pemerintahan yang baik. E-procurement pada umumnya merupakan sistem database yang terintegrasi dan luas berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi untuk sebagian atau seluruh proses pengadaan. Menurut Adrian (2016:253) Salah satu bentuk penyelenggaraan e- government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (eprocurement).

METODE PENELITIAN

1. Pengamatan metode ini adalah metode penelitian melalui pengamatan langsung dan pencatatan sistematis Fenomena yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Wawancara metode ini adalah dialog untuk tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana Pegawai di kantor Pengadaan Barang dan Jasa diminta untuk memberi pendapat dan ide yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai tanggung jawabnya.
3. Dokumentasi, bertujuan untuk memperoleh data dari berbagai catatan penting yang belum banyak dipublikasikan. dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan lembaga tempat penelitian. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan dan

kebijakan. Di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa.

4. Teknik Analisis Data, Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

- a. Reduksi Data Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Verifikasi Data Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu berinisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu perintah atasannya sebanyak 7 orang atau 50%, yang menjawab sering berinisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu perintah atasannya sebanyak 7 orang atau 50%, dan tidak ada responden yang menjawab jarang ataupun tidak pernah berinisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu perintah atasannya. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki inisiatif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu perintah dari atasannya.

Kemamfaatan Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor sebanyak 2 orang atau 14,3%, yang menjawab sering melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor sebanyak 8 orang atau 57,1%, yang menjawab jarang melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor sebanyak 4 orang atau 28,6% dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sering melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor, dan tidak ada pegawai yang tidak pernah melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kantor.

Evaluasi Pekerjaan Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu memeriksa kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan sebanyak 2 orang atau 14,3%, yang menjawab sering memeriksa kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan sebanyak 10 orang atau 71,4%, yang menjawab jarang memeriksa kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan sebanyak 2 orang atau 14,3% dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah memeriksa

kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sering memeriksa kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan, dan tidak ada pegawai yang tidak pernah memeriksa kembali pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan.

Semanagat Kerja berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu ikhlas dalam bekerja di kantor sebanyak 10 orang atau 71,4%, yang menjawab sering ikhlas dalam bekerja di kantor sebanyak 4 orang atau 28,6%, dan tidak ada responden yang menjawab jarang atau tidak pernah ikhlas dalam bekerja di kantor. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selalu ikhlas dalam bekerja di kantor, dan tidak ada pegawai yang jarang atau tidak pernah ikhlas dalam bekerja di kantor. Peneliti juga mengutip hasil dari wawancara dengan salah seorang staf pegawai.

Pelayanan Masyarakat dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tenggang waktu yang dijanjikan sebanyak 9 orang atau 64,3%, yang menjawab sering memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tenggang waktu yang dijanjikan sebanyak 5 orang atau 35,7%, dan tidak ada responden yang menjawab jarang ataupun tidak pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tenggang waktu yang dijanjikan. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tenggang waktu yang dijanjikan. Disini peneliti juga melakukan interview kepada salah satu responden dari kalangan masyarakat yang pernah berurusan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut.

Pencapaian Target, Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu mencapai target kerja yang telah ditetapkan sebanyak 1 orang atau 7,1%, yang menjawab sering mencapai target kerja yang telah ditetapkan sebanyak 8 orang atau 57,1%, yang menjawab jarang mencapai target kerja yang telah ditetapkan sebanyak 3 orang atau 21,4%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah mencapai target kerja yang telah ditetapkan.

Motivasi Kerja pegawai, Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu menambah durasi kerja apabila pekerjaan yang dilakukan belum mencapai target sebanyak 2 orang atau 14,36%, yang menjawab sering menambah durasi kerja apabila pekerjaan yang dilakukan belum mencapai target sebanyak 5 orang atau 35,7%, yang menjawab jarang menambah durasi kerja apabila pekerjaan yang dilakukan belum mencapai target sebanyak 7 orang atau 50%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak menambah durasi kerja apabila pekerjaan yang dilakukan belum mencapai target. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah jarang menambah durasi kerja apabila pekerjaan yang dilakukan belum mencapai target.

Kerja sama, Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyaknya responden yang menjawab selalu sering memberikan inovasi baru dengan pimpinan untuk kemajuan kantor sebanyak 3 orang atau 21,4%, yang menjawab sering memberikan terobosan-terobosan baru dengan pimpinan untuk kemajuan kantor sebanyak 5 orang atau 35,7%, yang menjawab jarang memberikan terobosan-terobosan baru dengan pimpinan untuk kemajuan kantor sebanyak 1 orang atau 7,1%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah memberikan terobosan-terobosan baru dengan pimpinan untuk kemajuan kantor. Hasil angket tersebut menandakan bahwa secara umum antara pimpinan dan para pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah jarang saling memberikan terobosan-terobosan baru dengan pimpinan untuk kemajuan kantor.

DAFTAR PUSTAKA

A., Morissan M. dkk. 2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana. Afandi, 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Zanaf Publishing: Riau Ahyar, Hardani et al. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif

Berger, & Kriyantono. (2020). (dalam kriyantono, 2020, h, 289) Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif.

Fuadah Aah Tsamrotul, 2021, Buku Daras Peradilan Agama di Indonesi, Cetakan Pertama, PT. Liventurindo, Bandung

Hasibuan, Malayu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasman .2022. Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam. Jurnal Professional, Vol. 9 No. 2, Desember 2022 page: 591-596.

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 10 Tahun 2018 dimana menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pratiwi Dian. Yuni. 2020. Dampak Pencemaran Logam Berat (Timbal, Tembaga, Merkuri, Kadmium, Krom) Terhadap Organisme Perairan dan Kesehatan manusia. Jurnal

Akuatek. Vol. 1, No. 1: 59-65. Sanusi Anwar. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua. Bandung: Salemba Empat.

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dokumen

Renstra Kabupaten Mamberamo tengah 2022 - 2027

Laporan Kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.